

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka

2.1.1.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran merupakan seseorang yang digolongkan dalam angkatan kerja yang aktif sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu tetapi di saat itu tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang dimana mereka tidak memiliki pekerjaan atau sedang giat mencari pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidupnya dimana angkatan kerja terdiri dari laki-laki atau perempuan yang berada di usia 15-64 tahun (Sumarsono, 2009).

Pengangguran merupakan situasi di mana individu yang ingin bekerja dan memiliki kemampuan untuk melakukannya tidak berhasil menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan minatnya dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam periode bulanan atau tahunan. Dalam konteks ini, individu yang menganggur dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja yang tidak sedang bekerja tetapi aktif mencari pekerjaan (Suharnanik, 2023).

Mengacu pada Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pengangguran didefinisikan sebagai; (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan, tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran (Agusalim, 2022).

Sedangkan menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

$$TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Pengangguran terbuka juga meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dalam tingkat pengangguran terbuka terdapat beberapa jenis klasifikasi umur masyarakat yang bisa diakategorikan dalam pengangguran yaitu :

a. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja dan menganggur atau bisa juga dinyatakan angkatan kerja apabila usia diatas 15 tahun keatas yang tidak dalam melakukan pendidikan maka bisa dikatakan angkatan kerja. Jika usia diatas 15 tahun keatas tetapi dalam melakukan pendidikan maka bukan angkatan kerja.

b. Bukan Angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang selama seminggu ini mempunyai kegiatan yang tidak termasuk dalam angkatan kerja, seperti :

- 1) Orang yang sedang melakukan pendidikan baik SD,SMP,SMP,SMA ataupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi

- 2) Orang yang mengurus rumah tangga yaitu mereka yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga atau membantu mengurus rumah tangga tanpa mendapat upah.
- 3) Lainnya yaitu mereka yang sudah tidak dapat melakukan kegiatan sebelumnya, seperti sudah lanjut usia, cacat jasmani, cacat mental atau lainnya.

2.1.1.2 Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori-teori pengangguran di Indonesia, yaitu:

a. Teori Klasik

Teori klasik berpendapat bahwa pengangguran dapat dihindari melalui mekanisme penawaran dan harga di pasar bebas, yang memastikan terciptanya permintaan yang dapat menyerap seluruh penawaran. Dalam pandangan ini, pengangguran dianggap sebagai hasil dari misalokasi sumber daya yang bersifat sementara, yang dapat diselesaikan melalui penyesuaian harga. Ketika terdapat kelebihan penawaran tenaga kerja, upah akan mengalami penurunan, yang dapat menyebabkan penurunan dalam produksi perusahaan. Namun, seiring dengan penurunan biaya, permintaan tenaga kerja akan meningkat karena perusahaan dapat memperluas produksi. Peningkatan jumlah tenaga kerja ini pada gilirannya akan menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, asalkan harga tetap relatif stabil.

b. Teori Keynes

Sebaliknya, teori Keynes berargumen bahwa pengangguran muncul akibat rendahnya permintaan agregat. Menurut Keynes, terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya tingkat produksi, melainkan oleh rendahnya konsumsi. Dalam pandangan ini, pasar bebas tidak selalu dapat mengatasi masalah pengangguran. Ketika jumlah tenaga kerja meningkat, upah yang turun justru merugikan pekerja karena mengurangi daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa. Akibatnya, produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan perlunya campur tangan pemerintah untuk mempertahankan tingkat permintaan agregat, sehingga sektor pariwisata dapat berfungsi sebagai pencipta lapangan kerja. Penting untuk dicatat bahwa peran pemerintah adalah menjaga tingkat permintaan agregat, sementara sektor wisata berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk menjaga pendapatan masyarakat dan daya beli, sehingga tidak memperburuk kondisi resesi dan membantu mengatasi pengangguran yang diakibatkan oleh resesi.

c. Teori Malthus

Teori Malthus tentang kependudukan menjadi referensi penting dalam konteks masyarakat modern. Kebutuhan akan tenaga kerja yang besar dalam masyarakat modern mendorong pertumbuhan populasi yang tinggi. Akan tetapi, penambahan lapangan pekerjaan tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Akibatnya, terjadi persaingan yang ketat di antara

masyarakat untuk memperoleh pekerjaan. Mereka yang tidak dapat bertahan dalam kompetisi ini akhirnya menjadi bagian dari kelompok pengangguran.

2.1.1.3 Bentuk- bentuk Pengangguran

Pengangguran terjadi akibat ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran di pasar kerja. Bentuk-bentuk pengangguran menurut Sumarsono (2009) meliputi:

a. Pengangguran Friksional

Pengangguran Friksional adalah jenis pengangguran yang timbul karena kesulitan sementara dalam mencocokkan pencari kerja dengan lowongan yang tersedia. Kesulitan ini bisa muncul dalam beberapa bentuk: waktu yang dibutuhkan untuk proses lamaran dan seleksi, yang dapat dipengaruhi oleh factor jarak atau kurangnya informasi; mobilitas pencari kerja yang rendah, di mana lowongan pekerjaan justru berada jauh dari tempat tinggal mereka; ketidakpahaman pencari kerja mengenai lokasi yang menawarkan tenaga kerja yang sesuai. Pengangguran ini terhalang oleh ketidaklancaran dalam proses permintaan dan penawaran tenaga kerja, yang dapat disebabkan oleh faktor tempat dan waktu.

b. Pengangguran Musiman

Pengangguran musiman adalah jenis pengangguran yang muncul akibat perubahan musim. Di luar musim panen dan saat turun ke sawah, banyak individu yang tidak memiliki kegiatan ekonomi dan hanya menunggu musim berikutnya. Selama masa menunggu ini, mereka dianggap sebagai pengangguran musiman. Aktivitas ekonomi masyarakat sering kali dipengaruhi

oleh siklus musim. Ada periode di mana permintaan tenaga kerja meningkat, dikenal sebagai musim giat, dan ada pula waktu-waktu di mana aktivitas ekonomi melambat. Peralihan antara musim giat dan musim kendur terjadi secara teratur dalam satu tahun, dan selama masa kegiatan melambat, pengangguran ini akan terselesaikan dengan sendirinya ketika musim giat kembali tiba.

c. Pengangguran Siklikal

Pengangguran siklikal terjadi sebagai respons terhadap perubahan dalam siklus ekonomi, yang dapat dipengaruhi oleh fenomena alam dan faktor biologis. Seperti banjir yang merupakan gejala alam, kegiatan ekonomi juga mengalami fluktuasi, di mana mungkin terjadi ekspansi ketika aktivitas meningkat, diikuti oleh periode kejenuhan dan penurunan. Setelah penurunan ini, biasanya akan ada pula peningkatan kembali dalam aktivitas ekonomi. Pada saat ekspansi, optimisme meningkat, dan dampaknya terhadap kesempatan kerja menjadi positif. Kenaikan permintaan tenaga kerja selama periode ini akan mengurangi tingkat pengangguran, sedangkan sebaliknya, penurunan permintaan dapat menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran.

d. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang muncul akibat perubahan dalam struktur atau komposisi ekonomi. Perubahan ini seringkali memerlukan keterampilan baru yang tidak dimiliki oleh pencari kerja. Ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan keterampilan yang baru dibutuhkan menyebabkan terjadinya pengangguran. Salah satu indikasi

kemajuan ekonomi adalah perubahan dalam dominasi peranan yang dimainkan oleh setiap sektor dalam proses produksi dan dalam penyediaan kesempatan kerja.

e. Pengangguran Teknologis

Pertumbuhan industri mendorong adopsi teknologi dalam proses produksi. Perubahan teknologi merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Transformasi dalam teknologi produksi dapat memengaruhi kesempatan kerja dengan berbagai cara. Kekuasaan substitutif yang dihasilkan dari perubahan ini dapat mengubah spesifikasi pekerjaan, yang seringkali berdampak negatif pada kesempatan kerja dan menyebabkan pengangguran.

f. Pengangguran karena Kurangnya Permintaan Agregat

Permintaan total dari masyarakat menjadi dasar untuk pelaksanaan investasi. Pengeluaran investasi menciptakan peluang untuk meningkatkan kesempatan kerja. Namun, jika permintaan terhadap barang dan jasa menurun, maka permintaan tenaga kerja juga akan berkurang. Kurangnya permintaan agregat ini bukanlah masalah sementara, melainkan merupakan kondisi yang berlangsung dalam jangka panjang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami profil pengangguran berdasarkan pendidikan. Pengangguran yang tidak terdidik atau berpendidikan rendah cenderung lebih mudah diatasi karena kesempatan kerja bagi tenaga kerja terampil lebih besar, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan pun lebih tinggi.

Menurut Sukirno dalam Nurahman (2020) mengelompokkan pengangguran ke dalam empat kategori, yaitu:

1. Pengangguran Terbuka terjadi ketika pertumbuhan tenaga kerja melebihi jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia.
2. Pengangguran Tersembunyi muncul ketika terdapat kelebihan tenaga kerja yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi jenis kegiatan perusahaan, ukuran perusahaan, jenis insentif yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai. Contohnya, jika jumlah pelayan di sebuah restoran melebihi kebutuhan, maka kelebihan pelayan tersebut termasuk dalam kategori pengangguran tersembunyi.
3. Pengangguran Musiman dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama yang berkaitan dengan musim atau cuaca. Dalam sektor pertanian atau perikanan, misalnya, petani atau nelayan mungkin meraih keuntungan besar saat cuaca baik, tetapi saat cuaca buruk, mereka bisa kehilangan penghasilan dan terpaksa menganggur karena tidak memiliki pekerjaan lain.
4. Setengah Menganggur sering kali disebabkan oleh urbanisasi yang pesat di Indonesia. Banyak penduduk yang kesulitan menemukan pekerjaan di kota, dan beberapa di antara mereka hanya bisa bekerja satu atau dua hari dalam seminggu. Pekerja dalam kategori ini dianggap sebagai setengah menganggur.

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2.1.2.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Dengan

perkataan lain arah dari pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quntitative change*) dan bisanya dihitung dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (*total market value*) dari barang akhir dan jasa (*final goods and service*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun (Ummah, 2019).

Menurut Todaro (2002) PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain (Sukirno dalam Liow et al., 2022).

Sedangkan Menurut Badan Pusat Statistik (BPS 2017) pengertian dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah penjumlahan seluruh nilai tambah yang diperoleh keseluruhan unit usaha dalam suatu daerah ataupun penjumlahan seluruh nilai barang dan jasa akhir yang diperoleh keseluruhan unit ekonomi di suatu daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan tingkat perekonomian suatu daerah baik barang dan jasa yang di produksi oleh rumah tangga, swasta maupun pemerintah di suatu wilayah dalam satu periode tertentu. Seluruh hasil produksi barang dan jasa yang di hasilkan oleh suatu wilayah di catat

oleh PDRB sehingga PDRB secara tidak langsung dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Rasid, 2012).

2.1.2.2 Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Realisasi pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan menggunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (Nuzulaili, 2022). Berbagai teori pertumbuhan ekonomi telah dikembangkan, di antaranya:

1) Teori Pertumbuhan Klasik

Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan populasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produksi. Namun, David Ricardo menyatakan bahwa jika populasi berkembang pesat, angkatan kerja bisa menjadi berlebihan, yang mengakibatkan penurunan upah dan kesejahteraan masyarakat.

2) Teori Pertumbuhan Neoklasik

Teori Solow-Swan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor produksi (seperti tenaga kerja dan modal) serta kemajuan teknologi. Solow menegaskan bahwa teknologi memainkan peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi. Negara-negara berkembang sering kali mengalami keterbelakangan karena alokasi sumber daya yang tidak tepat dan intervensi pemerintah yang berlebihan.

3) Teori Pertumbuhan Kuznet

Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan negara dalam menyediakan barang bagi warganya. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan produksi nasional yang stabil, kemajuan teknologi, dan perubahan dalam kelembagaan serta ideologi.

4) Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori ini menekankan pentingnya laju pertumbuhan alami yang terkait dengan efisiensi pendidikan dan jumlah tenaga kerja. Model ini dapat menghitung kebutuhan tabungan atau investasi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Harrod-Domar berpendapat bahwa untuk memaksimalkan penggunaan modal, permintaan agregat harus meningkat seiring dengan kapasitas modal yang dihasilkan dari investasi sebelumnya.

5) Teori Pertumbuhan Schumpeter

Teori Schumpeter menyoroti peran penting wirausahawan dalam pertumbuhan ekonomi. Wirausahawan terus-menerus berinovasi dan memerlukan investasi baru untuk mendukung kegiatan ini. Schumpeter berpendapat bahwa seiring pertumbuhan ekonomi, peluang untuk inovasi akan semakin terbatas, yang dapat memperlambat pertumbuhan (Syahullah, 2022).

2.1.2.3 Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto

Adapun menurut Kuncoro (2011), Metode Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto adalah sebagai berikut:

a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Dalam menghitung produk domestik bruto atas dasar harga berlaku, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui metode langsung dan tidak langsung.

1) Metode langsung

Metode langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data daerah atau data asli yang memperlihatkan keadaan wilayah, yang diambil dari sumber data

yang ada di wilayah tersebut. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan.

- Menurut Pendekatan Produksi Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 sektor atau lapangan usaha yaitu : Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.
- Menurut Pendekatan Pengeluaran Produk regional domestik bruto adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu: 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung 2) Konsumsi pemerintah 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto 4) Perubahan stok 5) Ekspor netto.
- Menurut Pendekatan Pendapatan Pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB

menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

2) metode tidak langsung

Metode tidak langsung adalah perhitungan dengan menggunakan data dari luar daerah/wilayah yang bersangkutan. Misalnya, dengan cara alokasi yaitu mengalokir PDB nasional menjadi PDRB Provinsi dengan menggunakan beberapa indikator produksi dana atau lainnya yang cocok dijadikan alokator. Dengan memetakan data ini ke daerah yang terkena dampak, perkiraan dibuat berdasarkan alokasi (Syahullah, 2022)

b) PDRB Atas Harga Konstan

Dalam menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Revaluasi

Metoda ini dilakukan dengan cara menilai baik produksi, biaya antara maupun nilai tambah masing-masing tahun dengan harga pada tahun dasar (tahun 2000) dan hasilnya merupakan nilai produksi dan nilai tambah atas dasar harga konstan tahun 2000. Di dalam praktek sangat sulit untuk melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan untuk proses produksi karena mencakup komponen yang relatif banyak dan bervariasi, disamping itu data harga yang tersedia tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian antara nilai produksi atas dasar harga konstan masing-masing tahun dengan rasio biaya antara terhadap nilai produksi dari hasil survei khusus.

➤ Ekstrapolasi

Nilai tambah atas dasar harga konstan tahun 2000 untuk masing-masing tahun diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi. Indeks produksi ini merupakan indeks indeks dari masing-masing jenis produksi yang dihasilkan, atau menggunakan indikator produksi seperti tenaga kerja, jumlah aktivitas dan lain-lainnya sesuai dengan jenis kegiatan yang dihitung. Ekstrapolasi dapat pula dilakukan terhadap penghitungan nilai produksi atas dasar harga konstan.

➤ Deflasi

Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan tahun 2000 dapat pula dicari dengan cara deflasi, yaitu dengan membagi nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga yang sesuai dengan sektornya. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator antara lain : Indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan dan sebagainya. Indeks harga tersebut dapat pula berfungsi sebagai inflator, dalam keadaan nilai tambah atas dasar harga konstan yang diketahui lebih dahulu yaitu dengan cara mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harganya.

➤ Deflasi Ganda

Di dalam penerapan deflasi berganda ini dideflasikan adalah nilai produksi dan biaya antara masing-masing tahun, sedangkan nilai tambahnya diperoleh dari selisih keduanya dari hasil perhitungan tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflatornya dalam penghitungan nilai produksi atas dasar harga konstan biasanya adalah indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar

sesuai dengan cakupan komoditasnya. Sedangkan indeks harga yang dipakai untuk memperoleh biaya antara atas dasar harga konstan adalah indeks harga dari komponen biaya yang terbesar kontribusinya (Bps, 2012).

2.1.3 Upah Minimum

2.1.3.1 Pengertian Upah

Konsep Upah Menurut Sukirno dalam Firdausi (2020) upah diartikan sebagai pembayaran keatas jasa- jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah ialah hak para pekerja yang diterima dan juga dinyatakan dalam bentuk uang yang merupakan suatu imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha kepada pekerja/buruh yang telah ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, dan peraturan. Upah merupakan sumber pendapatan utama bagi individu, sehingga penting untuk memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya. Upah dibayarkan oleh pemberi kerja sebagai kompensasi atas usaha dan gagasan yang disumbangkan karyawan kepada pemberi kerja. Bentuk pendapatan ini merupakan pembayaran dari pemberi kerja kepada karyawan atas pekerjaan atau jasa yang diberikan, yang dihitung dalam bentuk uang berdasarkan perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kontrak kerja antara pemberi kerja dan karyawan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.(Tri Utama, 2022)

Badan Pusat Statistik memberikan definisi tentang upah atau gaji adalah penerimaan buruh/karyawan/ pegawai baik berupa uang atau pun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan setelah dikurangi dengan potongan-potongan berupa iuran wajib dan lainnya. Selanjutnya, BPS memaparkan batasan

upah menurut Dewan Penelitian Perupahan yang menyatakan bahwa “upah” merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan undang-undang atau peraturan-peraturan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian antara pemberi kerja dan penerima kerja (Lamijan & Wiwoho, 2021)

2.1.3.2 Kebijakan dan Aturan Pengupahan

Kebijakan dan Aturan Pengupahan Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja melalui Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP No. 78 Tahun 2015). Peraturan tersebut menyebutkan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi pekerja atau buruh. Kebijakan pengupahan tersebut meliputi, sebagai berikut.

a) Upah Minimum

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Permenakertrans No. 7 Tahun 2013), upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Upah minimum merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah kepada karyawan, yang dapat digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada karyawan di

lingkungan usahanya. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, kebutuhan hidup layak adalah standar kebutuhan seorang pekerja lajang untuk dapat hidup layak secara fisik, untuk kebutuhan satu bulan. Adapun, jumlah komponen dan jenis kebutuhan berdasarkan KHL terdiri atas 60 jenis yang mencakup makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi, dan tabungan. Kebijakan penetapan upah disesuaikan dengan perkembangan di masyarakat dan sesuai pertumbuhan ekonomi sehingga kebijakan tentang pembayaran upah bisa berubah, baik di tingkat wilayah kota dan kabupaten dan provinsi. Nilai KHL digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Nilai KHL diperoleh melalui survei harga yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh ketua Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Hal ini karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda.

1) Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. UMP merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri dalam memberikan upah kepada pekerja di

lingkungan usaha atau kerjanya. Disebut UMP karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda.

- 2). Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) UMK adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/ kota. UMK ditetapkan gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/wali kota. Selambat - lambatnya tanggal 21 November setiap tahunnya dan setelah penetapan UMP.

- 3). Upah Kerja Lembur

Selain untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang diatur tersendiri dalam keputusan menteri, setiap perusahaan wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Sementara itu, jika upah terdiri atas upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, dengan ketentuan upah pokok tambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75% keseluruhan upah, dasar perhitungan upah lembur adalah 75% dari keseluruhan upah.

Perusahaan yang telah melaksanakan dasar perhitungan upah lembur yang nilainya lebih baik dari keputusan menteri di atas maka perhitungan upah lembur tersebut tetap berlaku. Jika terjadi perbedaan perhitungan, yang berwenang menetapkan besarnya upah lembur adalah pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota. Sementara itu, jika salah satu pihak tidak dapat meminta penetapan uang kepada pengawas ketenagakerjaan di provinsi. Demikian seterusnya, hingga tingkat pengawas ketenagakerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2.1.3.3 Pelaksanaan Upah Minimum

Pelaksanaan upah minimum merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 menyebutkan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok, termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Pasal 1 Angka 2 menyebutkan pengertian UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/ kota di satu provinsi. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota (Trimaya, 2014)

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) bersama Lembaga Tripartit Nasional serta Lembaga Tripartit Daerah, ditujukan untuk melindungi tenaga kerja. Upah merupakan salah satu faktor utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja dalam membantu mewujudkan ketenangan kerja, kemampuan berusaha, serta pertumbuhan ekonomi. Melalui ketetapan upah minimum yang setiap tahunnya akan dinaikkan besarnya, diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja di Indonesia.(Trimaya, 2014).

2.1.3.4 Sitem Upah

Terdapat beberapa penggolongan Upah:

1. Upah sistem waktu

Dalam sistem ini, upah dihitung berdasarkan jam, hari, minggu, atau bulan, dan hanya didasarkan pada lamanya bekerja, bukan prestasi kerja.

2. Upah sistem hasil

Dalam sistem ini, upah dihitung berdasarkan unit yang dibuat atau dijual oleh pekerja. Di lembaga keuangan syariah, karyawan biasanya dikenakan sistem upah seperti ini di bidang marketing. Model ini menentukan jumlah nasabah penabung yang dapat ditarik atau pembiayaan yang dapat diberikan.

3. Upah sistem Borongan

Sistem borongan menentukan upah berdasarkan waktu kerja dan jumlah pekerja.

2.1.3.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besaran Upah

Menurut Lamijan & Wiwoho (2021) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor atau kriteria yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kelayakan, keadilan, kebutuhan dan kontribusi mengenai penetapan upah. Faktor-faktor atau kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi pasar tenaga kerja, artinya tingkat gaji atau upah dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Untuk jabatan-jabatan yang sangat terbatas ketersediaan pekerjaannya dalam pasar tenaga kerja karena membutuhkan pekerja dengan kecakapan atau keterampilan yang tinggi, cenderung diberikan gaji/upah yang tinggi pula. Di sisi lain, untuk jabatan yang jumlah penawaran tenaga kerja atau pekerjaannya melimpah, cenderung tingkat gaji/upah biasanya juga rendah.

- 2) Peraturan perundang-undangan, artinya berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah, keputusan Menteri Tenaga Kerja atau peraturan-peraturan lainnya, harus diperhatikan oleh setiap organisasi perusahaan yang akan merancang ketentuan atau sistem pengupahan dan kompensasinya. Di Indonesia, salah satu ketentuan yang diikuti adalah peraturan tentang Upah Minimum Regional (UMR).
- 3) Kesepakatan kerja, artinya keberadaan serikat pekerja memungkinkan terjadinya perundingan antara pekerja dan pihak manajemen, baik mengenai jenis, struktur, maupun tingkat upah.
- 4) Sikap dan apresiasi manajemen, artinya keinginan kuat pihak manajemen untuk mempertahankan atau meningkatkan semangat kerja, menarik pekerja-pekerja berkualitas tinggi, mengurangi turnover, meningkatkan standar hidup kerja, dan mempengaruhi struktur dan tingkat gaji/upah.
- 5) Kemampuan membayar, artinya gaji/upah yang dibayarkan kepada pekerja merupakan komponen biaya produksi yang harus dihitung secara cermat oleh setiap perusahaan. Oleh sebab itu struktur dan tingkat gaji/upah harus disesuaikan dengan kemampuan membayar, apabila hal ini tidak dilakukan perusahaan dapat mengalami kerugian atau tidak mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- 6) Tingkat biaya kebutuhan hidup, artinya pemberian gaji/upah perlu mempertimbangkan komponen biaya kebutuhan hidup di suatu wilayah. Ketentuan upah minimum regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah

biasanya menjadi patokan biaya kebutuhan hidup di provinsi atau wilayah tertentu.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

2.1.4.1 Teori Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah salah satu indikator kemajuan suatu negara. Suatu negara dapat dikatakan maju bukan hanya dihitung dari Produk Domestik Bruto (PDB) saja, tetapi mencakup beberapa aspek yaitu aspek kesehatan dan pendidikan warga negaranya. Paradigma pembangunan terus mengalami perubahan evolusi, hingga saat ini paradigma pembangunan menjadikan manusia sebagai tujuan pembangunan. Kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan modal dasar dari kekayaan bangsa, sementara modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor produksi yang bersifat pasif. Pada hakekatnya, manusialah yang akan berperan aktif dalam aktivitas kegiatan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber daya alam dan melaksanakan pembangunan nasional (Mongan, 2019)

Menurut UNDP 1990 dalam Nur Isa Pratowo (2013), pembangunan manusia adalah suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk untuk membangun hidupnya yang dianggap berharga. Beberapa hal esensial dalam pembangunan manusia adalah agar manusia dapat merasakan kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan, dan mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang diperlukan untuk hidup layak.

Dalam perspektif UNDP (*United Nations Development Programme*), pembangunan manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choices of people*) sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya

tersebut. Pembangunan manusia juga dapat dilihat sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan penduduk.

Menurut BPS (2017) Konsep pembangunan manusia UNDP ini mengandung empat unsur: produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Dalam kerangka pembangunan manusia, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses pembangunan.

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan jalan meningkatkan kualitas penduduk dalam beberapa aspek yaitu :

- Aspek Fisik (kesehatan)
- Aspek Intelektualitas (pendidikan)
- Aspek Kesejahteraan Ekonomi (berdaya beli)
- Aspek Moralitas (iman dan takwa). Di sisi lain, perbaikan kualitas penduduk tersebut juga diiringi dengan pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/keterampilan mereka

2.1.4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dibuat dan dipopulerkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul “*Human Development Report*” Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional perkapit (Heka 2017). Menurut BPS (2015) Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia berdasarkan empat indikator, yaitu umur harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai salah satu tolak ukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kehidupan yang layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Andiny & Sari, 2018)

a) Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Mauliddiyah (2021), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, untuk mencapai pembangunan manusia maka dapat diukur dengan pencapaian kualitas hidup manusia dengan beberapa komponen yakni pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke tiga komponen yaitu:

1. Pendidikan

Tingkat pendidikan menggunakan 2 indikator yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat. Rata-rata lama sekolah mengukur jumlah rata-rata tahun masyarakat menempuh pendidikan formal atau bangku sekolah. Harapan lama sekolah adalah harapan lama anak menempuh pendidikan formal atau bangku sekolah. Perhitungannya kedua indikator diberi bobot rata-rata lama sekolah sebesar sepertiga dan harapan lama sekolah sebesar dua pertiga.

2. Kesehatan

Tingkat kesehatan menggunakan data angka harapan hidup penduduk dengan pendekatan tak langsung, data yang digunakan adalah Angka Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).

3. Daya Beli Masyarakat

Dalam indikator daya beli masyarakat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdampak membaiknya perekonomian daerah. Perhitungan daya beli masyarakat menggunakan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan

2.1.4.3 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Menurut BPS (2015) Indeks Pembangunan Manusia dengan metode baru dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{IKesehatan \times IPendidikan \times IPengeluaran \times 100}$$

Menurut Yektiningsih (2018) mengatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki tiga indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungannya:

- Kesehatan yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran.
Pendidikan, yang dapat dihitung dari angka harapan sekolah dan angka rata-rata lama sekolah.
- Standar hidup layak, yang dihitung dari produk nasional bruto per kapita.
yang mana IPM memiliki indikator penting untuk mengukur keberhasilan untuk membangun kualitas hidup penduduk, indeks pembangunan juga dapat menentukan pertumbuhan pembangunan disuatu wilayah.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Muhammad Diaz Danindra , Nunuk Triwahyunigtyas , Indri Arrafi Juliannisa. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Provinsi Banten 2015-2019" (2022)	Varibel Y (Pengangguran di Banten), Variabel X IPM dan Upah Minimum. Metode analisis : Data Panel	Data tahun yang digunakan (2015-2019). Variabel Inflasi	IPM mempunyai hubungan yang positif dengan tingkat pengangguran pada Provinsi Banten, upah minimum mempunyai hubungan yang negatif dengan tingkat pengangguran pada Provinsi Banten dan investasi mempunyai.	Jurnal Indonesia Sosial Sains. Vol. 3, No. 5, Mei 2022 E-ISSN:2723 – 6595

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				hubungan yang positif dengan tingkat pengangguran pada Provinsi Banten.	
2	Yarlina Yacoub , Maulidiah Firdayanti “Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat” (2019)	Varibel Y Pengangguran, Variabel X Pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum. Metode analisis : Data Panel	Variabel inflasi. Dan tempat penelitian yang digunakan di Provinsi Kalimantan Barat	Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel pengangguran. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel pengangguran. Variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel pengangguran. Pertumbuhan ekonomi tidak adanya pengaruh signifikan pada pengangguran terbuka.	Prosiding SATIESP 2019. No.ISBN: 978-602-53460-3-3
3	Rizki Ardian, Muhamad Syahputra, Deris Dermawan “Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia” (2022)	Variabel Y : pengangguran	Tempat penelitian yang digunakan di Indonesia, variabel x : pertumbuhan ekonomi metode analisis regresi linear sederhana.		EBISMEN, Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Vol.1, No.3 September 2022 e-ISSN: 2962-7621; p-ISSN: 2962-763X, Hal 190-198
4	Muhayaro, Khusnul Khotimah, Tiara Rahmawati, Indina, Pahmi, Deris Desmawan “Pengaruh Inflansi Dan	Varibel Y (Pengangguran di Banten),	Variabel investasi dan inflasi. Tahun yang digunakan 2017-2021. metode analisis regresi berganda	Variabel investasi dan inflasi tidak terlalu berpengaruh terhadap pengangguran di Banten pada tahun 2017-2021.	JURNAL MANAJEMEN AKUNTANSI (JUMSI) Vol. 4, No. 3 Juli 2024 Page 701-712 E-ISSN: 2774-4221

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Investasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Banten Tahun 2017-2021” (2024) Amgi Filiasari, Achma Hendra Setiawan “Pengaruh Angkatan kerja, upah, PDRB, dan Pendidikan terhadap tingkat pengangguran di provinsi Banten tahun 2002-2019” (2021)	Variabel Y (Pengangguran di Banten), Variabel X Upah dan PDRB	Variabel Angkatan kerja, Pendidikan. Tahun yang digunakan 2002-2019 Metode penelitian : regresi Ordinary Least Square (OLS)	Angkatan kerja, upah, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten sedangkan variabel pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.	DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume 10, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 1 ISSN (Print): 2337-3814
6	Rosita Alfiansyah Zunaida, Mulyo Hendarto Robertus “Hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto dan Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2020” (2022)	Variabel Y pengangguran, variabel x PDRB. Metode regresi data panel	Tempat penelitian yang dilakukan provinsi Jawa Tengah Tahun yang digunakan 2011-2020	Hasil dari penelitian ini adalah variabel PDRB memiliki hubungan positif terhadap variabel pengangguran	DIPONEGORO JOURNAL OF ECONOMICS Volume 11, Nomor 3, Tahun 2022, Halaman 202 ISSN (Print): 2337-3814
7	Devi Dwi Nuzulaili “Analisis Pengaruh Inflasi, PDRB Dan UMP Terhadap Pengangguran Di Pulau Jawa	Variabel Y pengangguran, variabel x PDRB dan upah minimum. Metode regresi data panel	Variabel X inflasi. Tempat penelitian yang dilakukan pulau Jawa Tahun yang digunakan 2017-2020	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh negatif signifikan, Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif	Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) Vol. 6, No. 2, Mei 2022, pp. 228-238

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2017-2020” (2022)			signifikan, dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengangguran di Pulau Jawa tahun 2017-2020	
8	najasyi Qausar , Renea Shinta Aminda “Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau” (2022)	Variabel Y pengangguran, variabel X, PDRB dan upah minimum. Metode regresi data panel	Variabel X rata-rata lama sekolah, Tempat penelitian yang dilakukan di Kepulauan Riau Tahun yang digunakan 2011-2020	Hasil penelitian secara parsial membuktikan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT, RLS dan UMK berpengaruh positif dan signifikan terhadap TPT.	Journal Of Development Economic and Digitalization Vol 1, No 1, 2022, pp. 38-5
9	Sarito Pasuria , Nunuk Triwahyuningtyas “Pengaruh Angkatan Kerja, Pendidikan, Upah Minimum, dan Produk Domestik Bruto terhadap Pengangguran di Indonesia” (2022)	Variabel Y pengangguran, variabel X, PDB/PDRB dan upah minimum.	Variabel X Angkatan kerja dan Pendidikan. Tempat penelitian yang dilakukan di Indonesia. Tahun yang digunakan 1990-2020 Metode analisis regresi linier berganda (Ordinary Least Squares)	secara parsial angkatan kerja, pendidikan, dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pengangguran, namun PDB tidak memiliki pengaruh terhadap pengangguran di Indonesia.	Sibatik Journal VOLUME 1 NO.6 (2022) E-ISSN : 2809- 8544
10	Indah Mei Pratiwi, Marseto, Sishadiyati “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks	Variabel Y pengangguran, variabel X, IPM dan upah minimum	Tempat penelitian yang dilakukan di Kabupaten Bangkalan.	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan	Jurnal Syntax Transformation Vol. 2 No. 6, Juni 2021 p- ISSN : 2721- 3854 e-ISSN : 2721-2769

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Kabupaten Bangkalan” (2021)		Tahun yang digunakan 2005-2019 Metode analisis regresi linier berganda (Ordinary Least Squares)	arah negatif dan berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengangguran. Sedangkan variabel Upah Minimum menunjukkan arah positif dan berpengaruh signifikan.	
11	Lailatul Qamariyah, Olga Mardianita W.P., Sulistya Rusgianto, Ph.D “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Investasi, dan Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2013-2020” (2022)	Variabel Y : pengangguran, variabel X : IPM dan upah minimum	Variabel X : Investasi Tempat penelitian yang dilakukan di Jawa Timur. Tahun yang digunakan 2013-2020 Metode analisis regresi linier berganda (Ordinary Least Squares)	Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IPM dan Investasi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Namun, pada variabel UMP memiliki pengaruh negative terhadap tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur tahun 2013-2020.	OECONOMIC US Journal of Economics Vol. 7, No. 1, December 2022 Print ISSN: 2548-6004; Online ISSN: 2715-4882
12	Muhammad Baihawafi, Asnita Frida Sebayang “Pengaruh Upah Minimum, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran Terbuka” (2023)	Variabel Y : pengangguran, variabel X : IPM dan upah minimum Metode regresi data panel	Variabel X : Laju Pertumbuhan Ekonomi Tempat penelitian yang dilakukan di Jawa Barat. Tahun yang digunakan 2018-2021	variabel Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif dan signifikan, variabel Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan. variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB). e-ISSN 2798-639X Volume 3, No. 1, Juli 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				variabel tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat.	
13	Charles G. Polii , Amran T. Naukoko , Hanly F. Dj. Siwu “pengaruh indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kota Tomohon” (2023)	Variabel Y pengangguran Variabel X : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Tempat penelitian yang dilakukan di Kota Tomohon. Tahun yang digunakan 2007-2021 Metode analisis regresi linier berganda (Ordinary Least Squares)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 23 No. 5 Mei 2023
14	Viky Mouren , Agnes Lutherani Ch. P. Lapien , Steeva Y.L Tumangkeng “pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara” (2022)	Variabel Y pengangguran Dan Variabel X : Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Variabel X : tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk Tempat penelitian yang dilakukan di Kota Toraja Utara. Tahun yang digunakan 2010 -2021 Metode analisis regresi linier berganda (Ordinary Least Squares)	hasil penelitian tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara tahun 2010-2021, sedangkan untuk jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Toraja Utara.	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 22 No. 5 Bulan Juli 2022
15	Kristina Adventi Koni Routa Geli , Harsono , Diah Widiawati “Pengaruh PDRB, Pertumbuhan Penduduk, dan UMK	Variabel Y pengangguran dan Variabel X : PDRB, UMK	Variabel X : Pertumbuhan ekonomi Tempat penelitian yang dilakukan di Kabupaten	Variabel PDRB dan UMK berpengaruh signifikan terhadap TPT, sedangkan variabel Pertumbuhan Penduduk tidak berpengaruh	Journal of Regional Economics Indonesia Vol. 2, No. 1, 2021 : 92-107

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Flores Timur Tahun 2010-2019” (2021)		Flores Timur Squares) Tahun yang digunakan 2010 -2019 Metode analisis regresi linier berganda (Ordinary Least Squares)	signifikan terhadap TPT; dan (vi) Variabel UMK mempunyai pengaruh yang dominan terhadap TPT di Kabupaten Flores Timur Tahun 2010-2019.	
16	Ghora Vira Handy Putra , Nur Hidayah “pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap pengangguran terbuka di provinsi Jawa barat tahun 2018-2021” (2023)	Variabel Y pengangguran dan Variabel X : PDRB dan UMK Metode analisis Data Panel	Variabel X : jumlah penduduk, Pendidikan, tingkat partisipasi Angkatan kerja Tempat penelitian yang dilakukan di Jawa Barat Tahun yang digunakan 2018-2021	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Penduduk dan Pendidikan tidak pengaruh terhadap Pengangguran Terbuka. Variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh negatif terhadap Pengangguran. Variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota berpengaruh positif terhadap Pengangguran Terbuka. Variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat tahun 2018- 2021.	KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen, Vol. 4 No. 1, 202

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu struktur konseptual yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dengan teori dalam tinjauan Pustaka.

2.2.1 Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Tingkat

Pengangguran Terbuka

Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dengan Pengangguran berpengaruh negatif. Hal ini sesuai bahwa George Mankiw menemukan hubungan antara tingkat PDRB yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, berdasarkan Hukum Okun, yang menguji hubungan antara besarnya PDRB suatu daerah dengan tingkat pengangguran. Hukum Okun, yang diperkenalkan oleh ekonom Arthur Okun, menjelaskan hubungan yang signifikan antara tingkat pengangguran dan PDB riil. Secara umum, terdapat hubungan negatif antara keduanya; ketika tingkat pengangguran meningkat, PDB riil cenderung menurun. Dalam ilustrasi Hukum Okun, sumbu horizontal merepresentasikan persentase PDB riil, sementara sumbu vertikal menunjukkan perubahan tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat pengangguran dari tahun ke tahun sangat berkaitan dengan fluktuasi PDB riil di periode yang sama. Setiap kali terjadi kenaikan persentase pengangguran di suatu daerah, hal itu sebanding dengan penurunan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Jika PDRB di suatu wilayah mengalami penurunan, maka produksi di daerah tersebut juga akan turun. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya konsumsi masyarakat dan berkurangnya tenaga

kerja yang digunakan oleh perusahaan akibat penurunan produksi (Tutupoho, 2019).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Qausar & Shinta Aminda, 2018) dimana PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap TPT kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau, karena dengan meningkatnya PDRB akan memberikan pertambahan output. Semakin bertambahnya output menjadikan faktor produksi yang dibutuhkan mengalami peningkatan yang satu diantaranya adalah permintaan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

2.2.2 Hubungan Upah Minimum Kabupaten/kota dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Hubungan Upah Minimum dengan Pengangguran berpengaruh positif. Adanya hubungan yang positif upah minimum dengan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini terjadi karena Ketika upah minimum mengalami kenaikan maka penggunaan faktor input pada tenaga kerja akan dikurangi sehingga terjadi pengangguran naik. Hal ini tentu hanya terjadi pada usaha yang bersifat formal (Sumarsono, 2009). Upah Minimum Kota (UMK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki hubungan positif, yang berarti bahwa jika nilai upah meningkat, hal ini cenderung berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran. Dalam konteks ini, John Maynard Keynes menjelaskan dalam karyanya bahwa peningkatan permintaan tenaga kerja hanya dapat terjadi jika upah minimum diturunkan (Prawira, 2018).

Hal ini sejalan dengan penelitian (Mauliddiyah, 2021) dimana variabel Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Adanya pengaruh positif dan signifikan menggambarkan apabila terjadi kenaikan upah

minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, maka akan terjadi kenaikan pada tingkat pengangguran di Kabupaten Bangkalan.

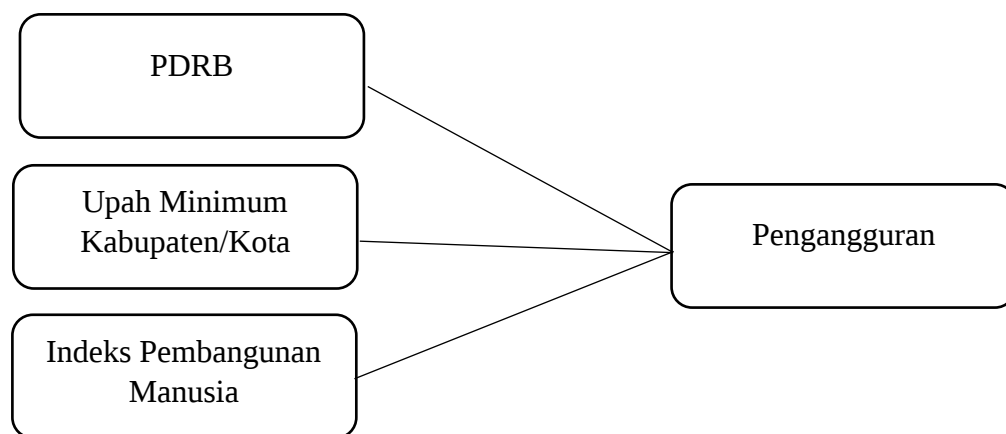
2.2.3 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Pengangguran Terbuka

Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif. Hal ini tercermin melalui tiga indikator utama: pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa, yang semuanya dapat mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Jika nilai IPM di suatu daerah tinggi, maka tingkat pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, jika nilai IPM rendah, tingkat pengangguran di wilayah tersebut bisa meningkat (Mahroji & Nurkhasanah, 2019). Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja. Apabila tenaga kerja berpendidikan rendah maka akan sulit untuk memasuki pasar tenaga kerja. Dengan demikian pendidikan yang merupakan salah satu indikator dari IPM berpengaruh terhadap tingkat pengangguran maka tenaga kerja berpendidikan rendah akan sulit menemukan pekerjaan sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran (Nurcholis, 2014)

Hal ini sejalan dengan penelitian (Muhammad Baihawafi & Asnita Frida Sebayang, 2023) bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. Jika erus mengalami peningkatan perbaikan maka kualitas manusia atau masyarakat akan mengalami peningkatan yang relatif baik sehingga

peningkatan kualitas dan kemampuan penduduk akan mengurangi jumlah pengangguran.

Berdasarkan uraian diatas, maka paradigma yang perlu diuji kebenarannya adalah bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB), Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pengangguran, yang disusun dalam kerangka pemikiran seperti pada gambar berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis berarti dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu permasalahan penelitian (Rahmaniar et al., 2015). Hipotesis ini harus dapat diuji secara empiris, yang berarti harus dapat dibuktikan dengan data yang diperoleh melalui penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, berikut adalah hipotesis yang dapat diuji kebenarannya dalam penelitian ini.

1. Diduga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara parsial berpengaruh negatif, sedangkan Upah

minimum kabupaten/kota (UMK) berpengaruh positif terhadap pengangguran di Provinsi Banten tahun 2014 – 2023.

2. Diduga produk domestik regional bruto (PDRB), Upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara bersama- sama berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Banten tahun 2014 – 2023.